

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024

DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayahnya atas tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan Rencana Kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial selama 1 (satu) Tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahunan Dinas Sosial merupakan keharusan dalam rangka menetapkan target tujuan, sasaran, program serta strategi implementasi program/ kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh Aparat/ Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas melalui koordinasi baik eksternal maupun internal dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk mensinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan program kegiatan sesuai dengan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan prioritas anggaran kabupaten bojonegoro Tahun 2024 yang telah di tetapkan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang terencana, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dari setiap program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada setiap tahun .

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 ini. Kami menyadari sepenuhnya buku ini masih membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu kami mengharap masukan, kritik dan sumbang saran dari semua pihak agar pelaksanaan program pembangunan bidang sosial di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Semoga buku tentang Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial.

Bojonegoro, 5 Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS
SOSIAL
Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	li
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat.....	34
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	35
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	37
BAB.IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
4.1 Program dan Kegiatan	39
BAB.V PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

2.1.1	Pencapaian Kinerja Perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Triwulan II	6
2.1.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro.....	10
2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro	19
2.4.1	Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro	22
2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bojonegoro.....	34
3.2.1	Tujuan dan Sasaran	38
4.1.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026. Dokumen Renja yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mempedomani Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rensta-PD) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bojonegoro.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial tahun 2024 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2024-2026.

Renja Perubahan Dinas Sosial juga berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta tata kerja Dinas, selanjutnya Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro merupakan komitmen bersama yang terencana dan sistematis dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dengan memperhatikan prioritas-prioritas program/ kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/ kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sehingga program/ kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien selama Tahun Anggaran 2024.

Selain daripada itu penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten

Bojonegoro yang telah disusun dengan kebijakan RPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk menyiapkan rancangan awal dari program dan kegiatan yang diusulkan serta merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
2. Sebagai pedoman atau acuan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan program/ kegiatan pada Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan konsisten untuk mencapai tujuan dan sasaran yang lebih baik.
3. Menjamin Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program-program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 untuk DPA-SKPD pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Jumlah Pagu Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.116.784.355.040,- dengan realisasi keuangan keadaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebesar 52.94% dengan realisasi belanja sebesar Rp. 61.824.691.027,-.

b. Evaluasi Capaian Kinerja Renja

Review hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024 pada Triwulan II dapat dilihat sebagai berikut :

a) Realisasi Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu:

- Program Pemberdayaan Sosial (27.69%)
 - 1. Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (0)
 - 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota (28.23%)
- Program Rehabilitasi Sosial (39.66%)
 - 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (39.63%)
 - 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti (39.89%)
- Program Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (56,30%)
 - 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar (91.74%)
 - 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (51.22%)
- Program Penanganan Bencana (40.92%)

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota (10.96%)
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota (37.67%)
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (21.89%)
 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota (21.89%)
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota (32.44%)
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (16,14%)
 2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah (34.74%)
 3. Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (22.09%)
 4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah (56.43%)
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (90.90%)
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (20.04%)
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (23.68%)
- b) Realisasi program/ kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tercapai 52.94% pada Triwulan II Keadaan s/d Tanggal 30 Juni 2024 Terealisasi sebesar Rp. 61.824.691.027,-;
- c) Faktor-Faktor terpenuhinya dan tidak terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan disebabkan antara lain karena adanya kebijakan penguatan program/ kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan penanganan PPKS dan dukungan dari kabupaten/ kota sehingga kegiatan tersebut diharapkan dapat tercapai secara maksimal di Tahun 2024;
- d) Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/ kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/ kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial;
- e) Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program/ kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Berikut Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 s/d Triwulan II Keadaan s/d Tanggal 30 Juni 2024 dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro s/d Triwulan II
Keadaan s/d Tanggal 30 Juni 2024

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	100 %	7,827,780,035	2,632,435,284	32.44%	50.98%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	27,280,500	4,403,000	16.14%	48.00%
1.06.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	4 dokumen	313,900	0.00	0.00%	45.60%
1.06.01.2.01.00 02	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen	4,072,500	0.00	0.00%	50.00%
1.06.01.2.01.00 04	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	14,578,000	0.00	0.00%	60.00%
1.06.01.2.01.00 06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64 laporan	4,014,900	380,500	9.48%	52.00%
1.06.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 aporan	4,301,200	4,022,500	93.52%	100%
1.06.01.2.02	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	5,538,487,298	1,924,281,250	34.74%	51.86%
1.06.01.2.01.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	264 orang/bulan	5,098,597,698	1,802,100,750	35.35%	55.00%
1.06.01.2.01.00 02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 dokumen	315,772,000	115,900,000	36.70%	36.70%
1.06.01.2.01.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 dokumen	32,488,600	5,900,500	18.16%	50.00%
1.06.01.2.01.00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 dokumen	84,100,000	0.00	0.00	0
1.06.01.2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2,912,300	380,000	13.05%	50.00%
1.06.01.2.01.00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	2,243,200	0.00	0.00%	0
1.06.01.2.01.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 laporan	2,373,500	0.00	0.00%	0
1.06.01.2.03	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Paket	9,865,600	2,179,300	22.09%	49.33%
1.06.01.2.03.00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2,191,100	2,179,300	99.46%	100%
1.06.01.2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2,054,500	0.00	0.00	50.00%
1.06.01.2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	5,620,000	0.00	0.00%	50.00%
1.06.01.2.06	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	283 Paket	290,721,864	122,415,172	42.11%	56.43%
1.06.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6,641,500	0.00	0.00	50.00%
1.06.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3,914,200	0.00	0.00%	50.00%
1.06.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	6,404,400	3,207,000	50.07%	100%

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.06.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Paket	12,728,700	2,769,500	21.76%	65.00%
1.06.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 dokumen	3,000,000	1,200,000	40.00%	50.00%
1.06.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	25,532,000	0.00	0.00%	40.00%
1.06.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 dokumen	232,501,064	115,238,672	49.56%	50.00%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17 Paket	246,041,379	223,652,000	90.90%	100%
1.06.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	2 unit	117,384,498	108,052,000	92.05%	100%
1.06.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	128,656,881	115,600,000	89.85%	100%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Jenis	1,392,983,394	279,149,812	20.04%	76.25%
1.06.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,000,000	2,000,000	100.00%	100%
1.06.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 laporan	239,539,894	105,608,312	44.09%	50.00%
1.06.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 laporan	37,736,400	11,606,000	30.76%	40.00%
1.06.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 laporan	1,113,707,100	159,935,500	14.36%	70.00%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64 Jenis	322,400,000	76,354,750	23.68%	25.00%
1.06.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	288,000,000	72,086,750	25.03%	40.00%
1.06.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	34,400,000	4,268,000	12.41%	50.00%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	65 %	1,550,979,000	823,695,050	27.69%	65.83%
		65%				
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	50 Lembaga	29,335,000	0.00	0.00	50.00%
1.06.02.2.02.00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 dokumen	29,335,000	0.00	0.00	50.00%
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	430 orang	1,521,644,000	429,484,123	28.23%	31.67%
		65%				
1.06.02.2.03.00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	100 Orang	356,552,000	0.00	0.00	25.00%
1.06.02.2.03.00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	216 Orang	985,197,000	351,697,623	35.70%	50.00%
1.06.02.2.03.00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Lembaga	179,895,000	77,786,500	43.24%	45.00%
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	75 %	7,568,458,552	3.001.600.836	39.66%	64.63%

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2840 orang	6,628,604,400	2,626,653,596	39.63%	53.33%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakan	300 orang	219,470,500	211,447,576	96.34%	96.3%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	20 Orang	55,980,000	35,226,000	62.93%	62.9%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1200 orang	6,198,078,400	2,333,220,020	37.64%	50.00%
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	70 orang	109,538,000	39,480,000	36.04%	45.00%
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	20,310,000	7,280,000	35.84%	50.00%
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1270 orang	25,227,500	0.00	0.00	25.00%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti	852 Orang	939,854,152	374,947,240	39.89%	48.75%
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	300 orang	15,680,700	0.00	0.00%	35.00%
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	300 orang	171,343,500	69,677,300	40.67%	40.67%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20 orang	54,284,700	37,266,700	68.70%	68.70%
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	15 orang	35,108,300	20,928,100	59.6%	59.6%
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 Orang	12,213,900	4,918,500	40.27%	40.27%
1.06.04.2.02.0012	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	30 orang	153,226,264	65,193,735	42.55%	42.55%
1.06.04.2.02.0013	Pemberian layanan rujukan	200 orang	390,387,788	147,051,905	37.67%	37.67%
1.06.04.2.02.0014	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten / kota	2 dokumen	107,609,000	29,911,000	27.80%	27.80%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	97,393,686,355	54,833,259,444	56.30%	55.83%
		80%				
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	45 lembaga	12,202,168,000	11,193,931,015	91.74%	75.00%
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan anak-anak terlantar	8475 Orang	12,055,450,000	11,138,231,000	92.39%	100%
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	3000 orang	146,718,000	55,700,015	37.96%	55.00%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	8391 KPM	85,191,518,355	43,639,328,429	51.22%	60.55%
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	200 Orang	30,363,000	10,496,200	34.57%	40.00%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	10.715 KPM	84,286,075,123	43,331,735,589	51.41%	60.00%

Kode Rekening	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN		CAPAIAN (%)	
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.06.05.2.02.00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	68193 KPM	875,080,232	297,096,640	33.95%	60.00%
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	100%	2,065,151,200	341,613,160	40.92%	58.50%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	30%	1,010,885,600	175,451,500	20.77%	40.00%
1.06.06.2.01.00 01	Penyediaan Makanan	1500 orang	80,214,600	2,212,000	2.65%	60.00%
1.06.06.2.01.00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	550 orang	887,966,100	131,641,100	9.04%	65.00%
1.06.06.2.01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	200 orang	42,704,900	41,598,400	67.67%	30.00%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	200 Orang	1,054,265,600	166,161,660	37.67%	61.00%
1.06.06.2.02.00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250 orang	1,054,265,600	166,161,660	37.67%	67.00%
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	90%	378,299,898	82,796,840	21.89%	21.89%
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	15 Unit	378,299,898	82,796,840	21.89%	35.00%
1.06.07.2.01.00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	13 Makam	33,439,066	1,720,400	5.14%	25.00%
1.06.07.2.01.00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	2 laporan	344,860,832	81,076,440	23.51%	45.00%
TOTAL			116,784,355,040	61,824,691,027	52.94%	52.94%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024, dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel T-C.29.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	DINSOS	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	DINSOS	
	1	06				Tujuan : Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk dan Rumah Tangga Miskin																DINSOS		
							Persentase Keluarga Miskin dan Rentan memiliki Usaha Ekonomi	12 %				10 %		10 %		100 %		10 %		83.33 %				
	1	06				Sasaran : Meningkatkan Kemampuan PPKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya																DINSOS		
							Persentase Bantuan Sosial Terhadap PPKS	95 %				90 %		73.90 %		82.11 %		73.90 %		77.79 %				
							Persentase Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin (PKH)	100 %				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
	1	06				Sasaran : Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin																DINSOS		
							Persentase Keluarga Miskin yang Memiliki Usaha	19 %				18 %		18 %		100 %		18 %		94.74 %				
1	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			4,652,937,000				1,550,979,000		429,484,123		27.69 %		429,484,123		9.23 %	DINSOS		
							Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	80 %				80 %		30 %		37.50 %		30 %		37.50 %				
							Persentase PSM dan TSKS yang akti	80 %				80 %		30 %		37.50 %		30 %		37.50 %				
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			88,005,000				29,335,000									DINSOS		
							Persentase Lembaga Pengumpul Dana Berizin dan Undian Gratis Berhadiah yang Mengelola sesuai dengan Ketentuan	150 Lembaga				50 Lembaga												
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			88,005,000				29,335,000									DINSOS		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	36 Dokumen				12 Dokumen												
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			4,564,932,000				1,521,644,000		429,484,123		28.23 %		429,484,123		9.41 %	DINSOS		
							Persentase PSM dan TSKS yang Difasilitasi	65 %				65 %		30 %		46.15 %		30 %		46.15 %				
							Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Difasilitasi	1290 Orang/Lembaga				430 Orang/Lembaga												
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			1,069,656,000				356,552,000									DINSOS		
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang				100 Orang												
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			2,955,591,000				985,197,000		351,697,623		35.70 %		351,697,623		11.90 %	DINSOS		

No	Kode					Urusan / Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	162 Orang				54 Orang		51 Orang		94.44 %		51 Orang		31.48 %			
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		539,685,000				179,895,000		77,786,500		43.24 %		77,786,500		14.41 %		DINSOS	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Lembaga				50 Lembaga											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																20.08 %	27.69 %			11.09 %	9.23 %		
2	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		13,339,646,056				7,568,458,552		3,001,600,836		39.66 %		3,001,600,836		22.50 %		DINSOS	
							Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	75 %				75 %		50 %		66.67 %		50 %		66.67 %			
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		10,252,813,200				6,628,604,400		2,626,653,596		39.63 %		2,626,653,596		25.62 %		DINSOS	
							Persentase PMKS yang di Fasilitasi Rehabilitasi	6540 Orang				2180 Orang		781 Orang		35.83 %		781 Orang		11.94 %			
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan		658,411,500				219,470,500		211,447,576		96.34 %		211,447,576		32.11 %		DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang				300 Orang		150 Orang		50.00 %		150 Orang		16.67 %			
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		167,940,000				55,980,000		35,226,000		62.93 %		35,226,000		20.98 %		DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang				35 Orang		35 Orang		100 %		35 Orang		46.67 %			
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		8,961,235,200				6,198,078,400		2,333,220,020		37.64 %		2,333,220,020		26.04 %		DINSOS	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5450 Orang				1540 Orang		1207 Orang		78.38 %		1207 Orang		22.15 %			
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		328,614,000				109,538,000		39,480,000		36.04 %		39,480,000		12.01 %		DINSOS	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang				70 Orang		54 Orang		77.14 %		54 Orang		25.71 %			
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		60,930,000				20,310,000		7,280,000		35.84 %		7,280,000		11.95 %		DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang				10 Orang		5 Orang		50.00 %		5 Orang		16.67 %			
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		75,682,500				25,227,500										DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	720 Orang				240 Orang		102 Orang		42.50 %		102 Orang		14.17 %			
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		3,086,832,856				939,854,152		374,947,240		39.89 %		374,947,240		12.15 %		DINSOS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
							Persentase / Jumlah PMKS yang di berikan Pelatihan Bantuan dan Layanan	3111 Orang				1037 Orang		524 Orang		50.53 %		524 Orang		16.84 %				
	1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		47,045,250					15,680,700									DINSOS		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	540 Orang				180 Orang		90 Orang		50.00 %		90 Orang		16.67 %				
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan		514,030,500					171,343,500		69,677,300		40.67 %		69,677,300		13.56 %	DINSOS		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang				300 Orang		150 Orang		50.00 %		150 Orang		16.67 %				
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		162,854,100					54,284,700		37,266,700		68.65 %		37,266,700		22.88 %	DINSOS		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang				20 Orang		12 Orang		60.00 %		12 Orang		20.00 %				
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		105,330,786					35,108,300		20,928,100		59.61 %		20,928,100		19.87 %	DINSOS		
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang				15 Orang		9 Orang		60.00 %		9 Orang		20.00 %				
	1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		36,641,550					12,213,900		4,918,500		40.27 %		4,918,500		13.42 %	DINSOS		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang				10 Orang		6 Orang		60.00 %		6 Orang		20.00 %				
	1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		460,087,242					153,226,264		65,193,735		42.55 %		65,193,735		14.17 %	DINSOS		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang				30 Orang		15 Orang		50.00 %		15 Orang		16.67 %				
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan		1,471,156,428					390,387,788		147,051,905		37.67 %		147,051,905		10.00 %	DINSOS		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1440 Orang				480 Orang		240 Orang		50.00 %		240 Orang		16.67 %				
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		289,687,000					107,609,000		29,911,000		27.80 %		29,911,000		10.33 %	DINSOS		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	6 Dokumen				2 Dokumen		2 Dokumen		100 %		2 Dokumen		33.33 %				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																60.27 %	39.66 %			20.68 %	22.50 %			
3	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			152,196,709,536				97,393,686,355		54,833,259,444		56.30 %		54,833,259,444		36.03 %	DINSOS		
							Persentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang di bantu	80 %				80 %		40 %		50.00 %		40 %		50.00 %				
							Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	100 %				100 %		50 %		50.00 %		50 %		50.00 %				
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			36,831,504,000				12,202,168,000		11,193,931,015		91.74 %		11,193,931,015		30.39 %	DINSOS		
							Persentase Anak Terlantar yang Difasilitasi Pemeliharaannya	135 Lembaga				45 Lembaga												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			36,391,350,000				12,055,450,000		11,138,231,000		92.39 %		11,138,231,000		30.61 %	DINSOS	
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	22257 Orang				7369 Orang		7255 Orang		98.45 %		7255 Orang		32.60 %			
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			440,154,000				146,718,000		55,700,015		37.96 %		55,700,015		12.65 %	DINSOS	
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	9000 Orang				3000 Orang											
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			115,365,205,536				85,191,518,355		43,639,328,429		51.22 %		43,639,328,429		37.83 %	DINSOS	
							Persentase data Fakir Miskin yang Valid	213852 KPM				71284 KPM		47855 KPM		67.13 %		47855 KPM		22.38 %			
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			91,089,600				30,363,000		10,496,200		34.57 %		10,496,200		11.52 %	DINSOS	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	600 Orang				200 Orang											
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			113,351,683,440				84,286,075,123		43,331,735,589		51.41 %		43,331,735,589		38.23 %	DINSOS	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	213852 Keluarga				71284 Keluarga		47855 Keluarga		67.13 %		47855 Keluarga		22.38 %			
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			1,922,432,496				875,080,232		297,096,640		33.95 %		297,096,640		15.45 %	DINSOS	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	204579 Keluarga				68193 Keluarga		55122 Keluarga		80.83 %		55122 Keluarga		26.94 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																44.79 %	56.30 %			14.90 %	36.03 %		
4	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			4,242,390,696				2,065,151,200		845,114,500		40.92 %		845,114,500		19.92 %	DINSOS	
							Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhannya	100 %				100 %		50 %		50.00 %		50 %		50.00 %			
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			3,002,896,800				1,010,885,600		209,972,500		20.77 %		209,972,500		6.99 %	DINSOS	
							Persentase Korban Bencana yang di Fasilitasi	30 %				30 %		30 %		100 %		30 %		100 %			
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan			240,643,800				80,214,600		47,597,700		59.34 %		47,597,700		19.78 %	DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	7650 Orang				4650 Orang		2272 Orang		48.86 %		2272 Orang		29.70 %			
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			2,634,138,300				887,966,100		160,596,800		18.09 %		160,596,800		6.10 %	DINSOS	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	951 Orang				317 Orang		226 Orang		71.29 %		226 Orang		23.76 %			
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			128,114,700				42,704,900		1,778,000		4.16 %		1,778,000		1.39 %	DINSOS	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang				100 Orang											
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			1,239,493,896				1,054,265,600		635,142,000		60.24 %		635,142,000		51.24 %	DINSOS	
							Jumlah Kader Masyarakat Tanggap Bencana	600 Orang				200 Orang		84 Orang		42.00 %		84 Orang		14.00 %			
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			1,239,493,896				1,054,265,600		635,142,000		60.24 %		635,142,000		51.24 %	DINSOS	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	450 Orang				150 Orang		139 Orang		92.67 %		139 Orang		30.89 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																59.14 %	40.92 %			33.06 %	19.92 %		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			1,134,900,396				378,299,898		82,796,840		21.89 %		82,796,840		7.30 %	DINSOS	
							Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	90 %				90 %	50 %		55.56 %		50 %		55.56 %				
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1,134,900,396				378,299,898		82,796,840		21.89 %		82,796,840		7.30 %	DINSOS	
							Persentase Unit Sarana Prasarana dan Pengamanan TMP dan Makam Leluhr yang di Pelihara	45 Unit				13 Unit	13 Unit		100 %		13 Unit		28.89 %				
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			100,317,600				33,439,066		1,720,400		5.14 %		1,720,400		1.71 %	DINSOS	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	45 Makam				2 Makam											
	1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			1,034,582,796				344,860,832		81,076,440		23.51 %		81,076,440		7.84 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	36 Laporan				12 Laporan	6 Laporan		50.00 %		6 Laporan		16.67 %				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																50.00 %	21.89 %			15.19 %	7.30 %		
						NON URUSAN																DINSOS	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																DINSOS	
	X	XX				Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Sosial															DINSOS		
							Nilai Sakip Dinas Sosial	88 %				86 %											
6	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25,212,714,383				7,827,780,035		2,632,435,284		33.63 %		2,632,435,284		10.44 %	DINSOS	
							Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %				100 %	50 %		50.00 %		50 %		50.00 %				
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81,841,710				27,280,500		4,403,000		16.14 %		4,403,000		5.38 %	DINSOS	
							Jumlah Dokumen yang Disusun	54 Dokumen				18 Dokumen	8 Dokumen		44.44 %		8 Dokumen		14.81 %				
	X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			941,460				313,900								DINSOS		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen				6 Dokumen	4 Dokumen		66.67 %		4 Dokumen		22.22 %				
	X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12,217,500				4,072,500								DINSOS		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18 Dokumen				6 Dokumen	3 Dokumen		50.00 %		3 Dokumen		16.67 %				
	X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			43,734,150				14,578,000								DINSOS		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen				4 Dokumen	2 Dokumen		50.00 %		2 Dokumen		16.67 %				
	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12,045,000				4,014,900		380,500		9.48 %		380,500		3.16 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	188 Laporan				60 Laporan	30 Laporan		50.00 %		30 Laporan		15.96 %				
	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12,903,600				4,301,200		4,022,500		93.52 %		4,022,500		31.17 %	DINSOS	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan				8 Laporan		5 Laporan		62.50 %		5 Laporan		20.83 %			
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,772,631,938				5,538,487,298		1,924,281,250		34.74 %		1,924,281,250		9.26 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	3 Laporan				1 Laporan											
	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18,997,181,658				5,098,597,698		1,802,100,750		35.35 %		1,802,100,750		9.49 %	DINSOS	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/bulan				17 Orang/bulan		16 Orang/bulan		94.12 %		16 Orang/bulan		10.67 %			
	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1,562,040,000				315,772,000		115,900,000		36.70 %		115,900,000		7.42 %	DINSOS	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen				24 Dokumen		14 Dokumen		58.33 %		14 Dokumen		19.44 %			
	X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			91,920,900				32,488,600		5,900,500		18.16 %		5,900,500		6.42 %	DINSOS	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1500 Dokumen				500 Dokumen		291 Dokumen		58.20 %		291 Dokumen		19.40 %			
	X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			98,955,000				84,100,000									DINSOS	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen				30 Dokumen											
	X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8,737,500				2,912,300		380,000		13.05 %		380,000		4.35 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan				1 Laporan											
	X	XX	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			6,894,000				2,243,200									DINSOS	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen				1 Dokumen											
	X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			6,902,880				2,373,500									DINSOS	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan				12 Laporan		4 Laporan		33.33 %		4 Laporan		11.11 %			
	X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			29,622,030				9,865,600		2,179,300		22.09 %		2,179,300		7.36 %	DINSOS	
							Jumlah Barang Milik Daerah yang Lengkap Adminitrasi	12 Unit				4 Unit		1 Unit		25.00 %		1 Unit		8.33 %			
	X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6,596,820				2,191,100		2,179,300		99.46 %		2,179,300		33.04 %	DINSOS	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen				2 Dokumen		2 Dokumen		100 %		2 Dokumen		33.33 %			
	X	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6,165,210				2,054,500									DINSOS	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan				1 Laporan											
	X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16,860,000				5,620,000									DINSOS	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan				1 Laporan		1 Laporan		100 %		1 Laporan		33.33 %			
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			888,064,200				290,721,864		122,415,172		42.11 %		122,415,172		13.78 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Adminitrasi Umum yang Disusun	117 Laporan				39 Laporan		11 Laporan		28.21 %		11 Laporan		9.40 %			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor							6,641,500									DINSOS	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket				1 Paket											
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14,709,000				3,914,200									DINSOS	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket				6 Paket											
	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2,550,000				6,404,400		3,207,000		50.07 %		3,207,000		125.76 %	DINSOS	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket				1 Paket											
	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26,805,000				12,728,700		2,769,500		21.76 %		2,769,500		10.33 %	DINSOS	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket				7 Paket		5 Paket		71.43 %		5 Paket		23.81 %			
	X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9,000,000				3,000,000		1,200,000		40.00 %		1,200,000		13.33 %	DINSOS	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen				12 Dokumen		6 Dokumen		50.00 %		6 Dokumen		16.67 %			
	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			76,500,000				25,532,000									DINSOS	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9 Laporan				3 Laporan											
	X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			758,500,200				232,501,064		115,238,672		49.56 %		115,238,672		15.19 %	DINSOS	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27 Dokumen				9 Dokumen		6 Dokumen		66.67 %		6 Dokumen		22.22 %			
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			233,932,500				246,041,379		223,652,000		90.90 %		223,652,000		95.61 %	DINSOS	
							Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di Sediakan	12 Jenis				4 Jenis		3 Jenis		75.00 %		3 Jenis		25.00 %			
	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel			149,850,000				117,384,498		108,052,000		92.05 %		108,052,000		72.11 %	DINSOS	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit				2 Unit		2 Unit		100 %		2 Unit		33.33 %			
	X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			84,082,500				128,656,881		115,600,000		89.85 %		115,600,000		137.48 %	DINSOS	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit				2 Unit		2 Unit		100 %		2 Unit		33.33 %			
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,379,822,005				1,392,983,394		279,149,812		20.04 %		279,149,812		11.73 %	DINSOS	
							Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Sediakan	210 Jenis				70 Jenis		38 Jenis		54.29 %		38 Jenis		18.10 %			
	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,000,000				2,000,000		2,000,000		100 %		2,000,000		33.33 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan				1 Laporan		1 Laporan		100 %		1 Laporan		33.33 %			
	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			490,316,085				239,539,894		105,608,312		44.09 %		105,608,312		21.54 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan				48 Laporan		24 Laporan		50.00 %		24 Laporan		16.67 %			
	X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			72,614,550				37,736,400		11,606,000		30.76 %		11,606,000		15.98 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan				12 Laporan		3 Laporan		25.00 %		3 Laporan		8.33 %			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2024 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yangDievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi AnggaranRKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,810,891,370				1,113,707,100		159,935,500		14.36 %		159,935,500		8.83 %	DINSOS	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27 Laporan				9 Laporan		4 Laporan		44.44 %		4 Laporan		14.81 %			
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			826,800,000				322,400,000		76,354,750		23.68 %		76,354,750		9.23 %	DINSOS	
							Jumlah Jenis Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33 Jenis				11 Jenis		5 Jenis		45.45 %		5 Jenis		15.15 %			
	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			708,000,000				288,000,000		72,086,750		25.03 %		72,086,750		10.18 %	DINSOS	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit				5 Unit		3 Unit		60.00 %		3 Unit		20.00 %			
	X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			118,800,000				34,400,000		4,268,000		12.41 %		4,268,000		3.59 %	DINSOS	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit				4 Unit		2 Unit		50.00 %		2 Unit		16.67 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																46.30 %	33.63 %			14.85 %	10.44 %		
JUMLAH TOTAL									200,779,298,067		0		116,784,355,040		61,824,691,027				61,824,691,027				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																46.76 %	52.94 %			18.29 %	30.79 %		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tahun 2024 merupakan tahun ke satu masa periode RPD, untuk menghitung kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di perlukan data valid dari realisasi kinerja tahun 2023. Sampai dengan Rancangan Rencana kerja disusun, belum dapat di hitung secara valid dan aktual data realisasi kinerja 2024, sedangkan data realisasi kinerja Tahun 2023 memiliki indikator yang berbeda dari periode RPD 2024-2026.

Periode RPD 2024-2026 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mendukung program-program prioritas bupati melalui **Isu Strategis RPD** yakni **“Peningkatan Kualitas SDM Kemiskinan”**.

Dari penjabaran isu strategis Program Kepala Daerah dituangkan dalam dua tujuan dua sasaran yang sudah dituangkan dalam Renstra tahun 2024-2026 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Tujuan :

Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk dan Rumah Tangga Miskin.

Indikator Tujuan :

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Memiliki Usaha Ekonomi.

2. Sasaran :

a. Meningkatnya Kemampuan PPKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya.

➤ Indikator :

Persentase Perlindungan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin (PKH)

➤ Indikator :

Persentase Bantuan Sosial terhadap PPKS

b. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin.

➤ Indikator :

Persentase Masyarakat Keluarga Miskin yang Memiliki Usaha

Berikut diuraikan Analisis Kinerja Pelayanan PD pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	38,99%	47,80%	12,8%	100%	100%	0,40 : 1	0,47 : 1	0,12:1	1:1	1:1
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	3,2%	76,61%	100%	100%	100%	0,03 : 1	0,76 : 1	1:1	1:1	1:1
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	29,08%	59,24%	100%	100%	100%	0,30 : 1	0,60 : 1	1:1	1:1	1:1
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Pengemis diluar Panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	12,12%	73,95%	100%	100%	100%	0,12 : 1	0,73 : 1	1:1	1:1	1:1
5	Perlindungan dan Jaminan saat tanggap dan paska bencana korban bencana kabupaten	100%		100%	100%	100%	100%	100%	91,43%	95,58%	100%	100%	100%	0,91 : 1	0,95 : 1	1:1	1:1	1:1
6	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.43%	90.83%	79,41%	100%	100%	0,91 : 1	0,90 : 1	0,79:1	1:1	1:1

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro mempunyai pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sosial.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan isu penting dalam penanganan kemiskinan dan pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa hal :

1. Kurangnya akurasi data PPKS dan kemiskinan
2. Rendahnya pemahaman PSKS dalam penanganan PPKS
3. Rendahnya Daya dukung sarana/ prasarana

Selain adanya permasalahan utama tersebut terdapat permasalahan secara teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat teknis, permasalahan tersebut diantaranya:

- a. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam penanganan PPKS, belum adanya penampungan dan tempat sebagai sarana pembinaan pada PPKS.
- b. Regulasi yang kurang sesuai untuk diterapkan dalam pencairan bansos.
- c. Kurang tenaga yang memadai untuk menangani PPKS.

Sebagai tindak lanjut kedepan supaya kendala dan hambatan ini dapat diminimalisir, maka target yang harus dilakukan pada tahun 2024 adalah :

1. Mengusulkan sarana dan prasaran untuk penanganan PPKS yang terlanter
2. Meningkatkan koordinasi perangkat daerah tentang penanganan PPKS
3. Mengusulkan Regulasi yang mudah untuk dilaksanakan dalam penyaluran bansos pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD terdapat program prioritas dalam pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dibandingkan dengan capaian pelaksanaan tahun lalu dan diharapkan dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dapat mengentaskan atau pengurangan tingkat kemiskinan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program/ kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial, Rivew ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program/ kegiatan, indikator kinerja program/ kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Dalam review ini tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Renstra dan Renja tahun 2024, sebagaimana penjelasan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.1
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD : Dinas osial

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Dinas Sosial	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7,827,780,035	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA	Dinas Sosial	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,686,569,523	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen yang disusun	18 Dokumen	27,280,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen yang disusun	18 Dokumen	26,402,500	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	313,900	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	313,900	
2	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	6 Dokumen	4,072,500	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	4,072,500	
3	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	14,578,000	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	5,074,000	
4	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	64 Laporan	4,014,900	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	60 Laporan	4,014,900	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	4,301,200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	12,927,200	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	1 Laporan	5,538,487,298	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	1 Laporan	4,247,584,786	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / Bulan	5,098,597,698	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / Bulan	3,827,887,186	
2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	315,772,000	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	295,580,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	32,488,600	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	32,488,600	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30 Dokumen	84,100,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30 Dokumen	84,100,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,912,300	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	2,912,300	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,243,200	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2,243,200	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 Laporan	2,373,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12 Laporan	2,373,500	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Barang Milik Daerah yang Lengkap Adminitrasi	3 Unit	9,865,600	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Barang Milik Daerah yang Lengkap Adminitrasi	4 Unit	9,865,600	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,191,100	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2,191,100	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,054,500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,054,500	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,620,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,620,000	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum yang Disusun	283 Laporan	290,721,864	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum yang Disusun	39 Laporan	277,436,464	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,641,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,641,500	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3,914,200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2,999,800	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,404,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Sosial	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,404,400	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	12,728,700	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Sosial	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	12,728,700	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	25,532,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	13,161,000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	232,501,064	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9 Dokumen	232,501,064	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	17 Jenis	246,041,379	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Jenis	596,730,079	
1	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	117,384,498	Pengadaan Mebel	Dinas Sosial	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	117,384,498	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	128,656,881	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	152,640,381	
3	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lain	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan	-	-	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lain	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan	2 Unit	326,705,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	72 Jenis	1,392,983,394	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	70 Jenis	1,154,380,094	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	239,539,894	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	239,709,394	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	37,736,400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	32,336,400	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,113,707,100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan	880,334,300	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	64 Jenis	322,400,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	11 Jenis	374,170,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	288,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	256,950,000	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	34,400,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	23,140,000	
3	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	-	-	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Sosial	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	2 Unit	94,080,000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab.bojo negoro	Persentase PSM dan TSKS yang aktif	65%	1,550,979,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab.bojo negoro	Persentase PSM dan TSKS yang aktif	80%	1,702,179,000	
			Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	65%				Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	80%		

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojo negoro	Persentase lembaga pengumpul dana berizin dan undian gratis berhadiah yang mengelola sesuai dengan ketentuan	50 Lembaga	29,335,000	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojo negoro	Persentase lembaga pengumpul dana berizin dan undian gratis berhadiah yang mengelola sesuai dengan ketentuan	50 Lembaga	29,335,000	
1	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab.Bojon egoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	29,335,000	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab.Bojon egoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	29,335,000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase PSM dan TSKS yang difasilitasi	430 Orang / Lembaga	1,521,644,000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase PSM dan TSKS yang difasilitasi	430 Orang / Lembaga	1,672,844,000	
			Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang difasilitasi	65%				Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang difasilitasi	65%		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	100 Orang	356,552,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	100 Orang	357,552,000	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	54 Orang	985,197,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	54 Orang	980,397,000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Lembaga	179,895,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	50 Lembaga	334,895,000	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab.Bojon egoro	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	75%	7,568,458,552	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab.Bojon egoro	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	75%	7,848,097,552	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab.Bojon egoro	Persentase PMKS yang difasilitasi rehabilitasi	2840 Orang	6,628,604,400	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab.Bojon egoro	Persentase PMKS yang difasilitasi rehabilitasi	2.180 Orang	6,623,293,300	
1	Penyediaan Permakan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	219,470,500	Penyediaan Permakan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	218,109,400	
2	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	55,980,000	Penyediaan Alat Bantu	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	35 Orang	55,980,000	
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	1540 Orang	6,198,078,400	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	1.540 Orang	6,197,128,400	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	70 Orang	109,538,000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	70 Orang	106,538,000	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	20,310,000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	20,310,000	
6	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data&PengaduanKewenangan Kabupaten / Kota	1270 Orang	25,227,500	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data&PengaduanKewenangan Kabupaten / Kota	240 Orang	25,227,500	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Kab.Bojon egoro	Presentase / Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan bantuan dan layanan	852 Orang	939,854,152	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Kab.Bojon egoro	Presentase / Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan bantuan dan layanan	1.037 Orang	1,224,804,252	
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	15,680,700	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	180 Orang	15,680,700	
2	Penyediaan Permakanan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	171,343,500	Penyediaan Permakanan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	300 Orang	165,593,481	
3	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	54,284,700	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	20 Orang	48,284,700	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4	Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	35,108,300	Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Kab.Bojon egoro	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	15 Orang	35,108,300	
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	12,213,900	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	10 Orang	12,213,900	
6	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Orang	153,226,264	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	30 Orang	154,928,764	
7	Pemberian layanan rujukan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	200 Orang	390,387,788	Pemberian layanan rujukan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	480 Orang	419,942,407	
8	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	2 Dokumen	107,609,000	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	2 Dokumen	373,052,000	
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab.Bojon egoro	Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	100%	97,393,686,355	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab.Bojon egoro	Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	100%	115,620,245,316	
			Presentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu	80%				Presentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu	80%		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab.Bojon egoro	Persentase anak terlantar yang difasilitasi pemeliharaannya	45 Lembaga	12,202,168,000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kab.Bojon egoro	Persentase anak terlantar yang difasilitasi pemeliharaannya	45 Lembaga	13,001,468,000	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Penjangkauan anak-anak terlantar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten / Kota	8.525 Orang	12,055,450,000	Penjangkauan anak-anak terlantar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten / Kota	7.869 Orang	12,854,450,000	
2	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten / Kota	3.000 Orang	146,718,000	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kab.Bojon egoro	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten / Kota	3.000 Orang	147,018,000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase data fakir miskin yang valid	8391 KPM	85,191,518,355	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase data fakir miskin yang valid	18.276 KPM	102,618,777,31 6	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	200 Orang	30,363,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	150 Orang	482,141,961	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	18.276 KPM	84,286,075,123	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	18.276 KPM	84,286,075,123	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Bojon egoro	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	68.193 KPM	875,080,232	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab.Bojon egoro	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	68.193 KPM	875,080,232	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13,416 Keluarga	16,975,480,000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab.Bojon egoro	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2,065,151,200	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab.Bojon egoro	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2,529,237,014	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase korban bencana yang diasilitasi	30%	1,010,885,600	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase korban bencana yang difasilitasi	30%	1,351,378,100	
1	Penyediaan Makanan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	1500 Orang	80,214,600	Penyediaan Makanan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	1500 Orang	104,434,600	
2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	317 Orang	887,966,100	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab.Bojon egoro	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	317 Orang	1,204,238,600	
3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten / Kota	200 Orang	42,704,900	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab.Bojon egoro	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten / Kota	100 Orang	42,704,900	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah kader masyarakat tanggap bencana	200 Orang	1,054,265,600	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah kader masyarakat tanggap bencana	200 Orang	1,177,858,914	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Bojon egoro	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	250 Orang	1,054,265,600	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab.Bojon egoro	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi & Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	150 Orang	1,177,858,914	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (ouput)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab.Bojon egoro	Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	90%	378,299,898	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kab.Bojon egoro	Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yg terpenuhi	90%	532,040,937	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab. Bojonegoro	Persentase unit sarpras dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang dipelihara	15 Unit	378,299,898	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Persentase unit sarpras dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang dipelihara	13 Unit	532,040,937	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	15 Makam	33,439,066	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	2 Makam	183,434,605	
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	2 Laporan	344,860,832	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	12 Laporan	348,606,332	
					116.784.355.040					134,918,369,342	

2.5 Telaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro diperoleh dari upaya untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam internal dinas dengan mengakomodasi usulan/prososal dari masyarakat serta mempertimbangkan upaya peningkatan pelayanan Perangkat Daerah. Untuk penelaahan usulan program/ kegiatan untuk masyarakat telah dirangkum dalam rancangan awal RKPD dan sudah masuk dalam Renja Perangkat Daerah, sehingga kegiatan yang ada sudah terakumulasi dalam Rancangan Awal (Ranwal) Renja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Adapun usulan program yang berhasil dikumpulkan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.5.1

**Usulan Program dan kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1	Bansos asistensi penyandang disabilitas @ Rp. 1.500.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 300.000.000	200 Orang	
2	Bansos Disabilitas Produktif (Handy Craft & Tata Boga) @2.000.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 80.000.000	40 Orang	
3	Bansos DBHCHT @ 2.000.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 32.996.000.000	16.498 Buruh	
4	Bansos untuk anak yatim dan anak terlantar non panti @ Rp. 1.500.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 11.953.500.000	7.969 Orang	
5	Bansos untuk orang sakit menahun / kronis @ Rp. 1.500.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 1.725.000.000	1.150 Orang	
4	Bansos untuk BPNT Daerah @ Rp. 2.000.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 11.670.000.000	5.835 KPM	
5	Bansos Uang untuk anak di LKSA	Kab. Bojonegoro	Rp. 823.500.000	40 LKSA	
6	Bansos Keluarga Anak Terlantar @ Rp. 1.700.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 37.500.000	25 Orang	
7	Bansos Eks ODGJ @ Rp. 1.000.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 40.000.000	40 Orang	
8	Bansos Korban Tindak Kekerasan @ Rp.1.500.000	Kab. Bojonegoro	Rp. 30.000.000	20 Orang	
9	Bansos Kemiskinan (@Rp.300.000 x 3)	Kab. Bojonegoro	Rp. 56,923,200,000	63.400 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara penghasil menengah atas (*upper-middle income country/ MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) **misi** pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju

keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat, dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional, memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas, membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontrainTELijen negara dalam penciptaan keamanan nasional, serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/ daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan

pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional, dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan.

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 mendukung isu strategis RPD Kabupaten Bojonegoro yakni **“Peningkatan Kualitas SDM Kemiskinan”**. Berikut tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Bojonegoro 2024-2026 dan Renstra Dinas Sosial 2024-2026:

1. Tujuan :

Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk dan Rumah Tangga Miskin.

Indikator Tujuan :

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Memiliki Usaha Ekonomi.

2. Sasaran :

a. Meningkatkan Kemampuan PPKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya.

➤ Indikator :

Persentase Perlindungan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin (PKH)

➤ Indikator :

Persentase Bantuan Sosial terhadap PPKS

b. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin.

➤ Indikator :

Persentase Masyarakat Keluarga Miskin yang Memiliki Usaha.

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai tersebut berpedoman terhadap RPD, Renstra dan RKPD sehingga diharapkan adanya keserasian dan keselarasan. Berikut tabel Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dari tahun 2024-2026.

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian Awal Tahun 2022	Proyeksi Realisasi Tahun 2023	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4			5	6	7
1	Meningkatkan Tarf Hidup Penduduk dan Rumah Tangga Miskin		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Memiliki Usaha Ekonomi.	10%	10%	10%	12%	12%
		Meningkatnya Kemampuan PPKS dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Rumah Tangga Miskin (PKH)	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Bantuan Sosial terhadap PPKS	77%	86%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin	Persentase Masyarakat Keluarga Miskin yang Memiliki Usaha.	17%	18%	18%	18%	19%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, penyusunan RPD yang berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan yang mengacu pada RPJPD untuk keselarasan program/ kegiatan pembangunan yang berkelanjutan
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro untuk Perubahan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kepala Bidang serta Sub Koordinator masing-masing terdiri dari 6 (Enam) Program, 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 62 (Enam Puluh Dua) Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan PD;
 - Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
- c) Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lain
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

2) Program Pemberdayaan Sosial

- a) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- b) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.

3) Program Rehabilitasi Sosial

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakan;
 - Penyediaan Alat Bantu;
 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat;
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.
- b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - Penyediaan Permakanan;
 - Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS Dan NAPZA;
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - Pemberian Layanan Rujukan;
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota.

4) Program Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;
 - Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar.
- b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.;
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5) Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Makanan;
 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - Pelayanan Dukungan Psikososial.
- b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota;
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.

Lokasi program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan tahun 2024, berdasarkan pada sebaran Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) di tempat tersebut, dengan kriteria untuk segera mendapat penanganan. Sehubungan hal tersebut dalam pelaksanaan program / kegiatan yang telah direncanakan, dibutuhkan dana sebesar Rp. 134.918.369.342,- (Seratus Tiga Puluh Empat Milyard Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Bojonegoro.

- c. Rumusan program/ kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jumlah program / kegiatan dan pagu indikatif.

Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama OPD : Dinas Sosial

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Rata-Rata Capaian Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	100%	6,686,569,523	DBH		100%	8,416,402,961
1	06	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	Dinas Sosial	18 Dokumen	26,402,500	DBH		18 dokumen	27,280,570
1	06	01	2	01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial	6 Dokumen	313,900	DBH		6 dokumen	313,820
1	06	01	2	01	00 02	Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dinas Sosial	6 Dokumen	4,072,500	DBH		6 dokumen	4,072,500
1	06	01	2	01	00 04	Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dinas Sosial	4 Dokumen	5,074,000	DBH		4 dokumen	14,578,050
1	06	01	2	01	00 06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dinas Sosial	60 Laporan	4,014,900	DBH		64 laporan	4,015,000

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01	2	01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Sosial	8 Laporan	12,927,200	DBH		8 laporan	4,301,200
1	06	01	2	02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	Dinas Sosial	1 Laporan	4,247,584,786	DBH		1 Laporan	6,924,210,646
1	06	01	2	02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Sosial	50 Orang / Bulan	3,827,887,186	DAU dan DBH		50 orang / bulan	6,332,393,886
1	06	01	2	02	00 02	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Sosial	24 Dokumen	295,580,000	DBH		24 dokumen	520,680,000
1	06	01	2	02	00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dinas Sosial	500 Dokumen	32,488,600	DBH		300 dokumen	30,640,300
1	06	01	2	02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Sosial	30 Dokumen	84,100,000	DBH		100 dokumen	32,985,000
1	06	01	2	02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Sosial	1 Dokumen	2,912,300	DBH		1 laporan	2,912,500
1	06	01	2	02	00 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dinas Sosial	1 Dokumen	2,243,200	DBH		1 dokumen	2,298,000
1	06	01	2	02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Dinas Sosial	12 Laporan	2,373,500	DBH		12 laporan	2,300,960

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01	2	03		Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Lengkap Adminitrasi	Dinas Sosial	4 Unit	9,865,600	DBH		3 Paket	9,874,010
1	06	01	2	03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Sosial	2 Dokumen	2,191,100	DBH		1 dokumen	2,198,940
1	06	01	2	03	00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	1 Laporan	2,054,500	DBH		1 laporan	2,055,070
1	06	01	2	03	00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Sosial	1 Laporan	5,620,000	DBH		1 laporan	5,620,000
1	06	01	2	06		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Umum yang Disusun	Dinas Sosial	39 Laporan	277,436,464	DBH		283 Laporan	302,662,900
1	06	01	2	06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket	6,641,500	DBH		1 Paket	6,641,500
1	06	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	6 Paket	2,999,800	DBH		3 Paket	4,903,000
1	06	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dinas Sosial	1 Paket	6,404,400	DBH		1 Paket	850,000
1	06	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Sosial	7 Paket	12,728,700	DBH		7 Paket	8,935,000
1	06	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan&Peraturan Perundang- Undangan yg disediakan	Dinas Sosial	12 Dokumen	3,000,000	DBH		12 dokumen	3,000,000

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01	2	06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Sosial	3 Laporan	13,161,000	DBH		3 laporan	25,500,000
1	06	01	2	06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Sosial	9 Dokumen	232,501,064	DBH		9 dokumen	252,833,400
1	06	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Dinas Sosial	4 Jenis	596,730,079	DBH		4 Jenis	77,977,500
1	06	01	2	07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Sosial	2 Unit	117,384,498	DBH		15 unit	49,950,000
1	06	01	2	07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Sosial	2 Unit	152,640,381	DBH		2 unit	28,027,500
1	06	01	2	07	00 09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lain	Jumlah gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan	Dinas Sosial	2 Unit	326,705,200	DBH dan SILPA		-	-
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Dinas Sosial	70 Jenis	1,154,380,094	DBH		72 Jenis	761,297,335
1	06	01	2	08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Sosial	1 Laporan	2,000,000	DBH		1 laporan	2,000,000
1	06	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Sosial	48 Laporan	239,709,394	DBH		48 laporan	128,636,800

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	01	2	08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	12 Laporan	32,336,400	DBH		6 laporan	24,204,850
1	06	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Sosial	9 Laporan	880,334,300	DBH dan SILPA		15 laporan	606,455,685
1	06	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Sosial	11 Jenis	374,170,000	DBH		64 Jenis	313,100,000
1	06	01	2	09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Sosial	5 Unit	256,950,000	DBH		7 unit	273,500,000
1	06	01	2	09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinas Sosial	4 Unit	23,140,000	DBH		2 Unit	39,600,000
1	06	01	2	09	00 09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Dinas Sosial	2 Unit	94,080,000	DBH		-	-
1	06	02				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSM dan TKSK yang aktif	Kab.Bojo negoro	80%	1,702,179,000	DBH		65%	1,550,979,000
							Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif		80%				65%	

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	02	2	02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase lembaga pengumpul dana berizin dan undian gratis berhadiah yang mengelola sesuai dengan ketentuan	Kab.Bojo negoro	50 Lembaga	29,335,000	DBH		50 Lembaga	29,335,000
1	06	02	2	02	00 01	Koordinasi dan Singkronisasi Penertiban Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kab.Bojon egoro	12 Dokumen	29,335,000	DBH		10 dokumen	29,335,000
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSM dan TKSK yang difasilitasi	Kab.Bojo negoro	430 Orang / Lembaga	1,672,844,000	DBH		430 orang/lemb	1,521,644,000
							Persentase Lembaga kesejahteraan sosial yang difasilitasi		65%				65	
1	06	02	2	03	00 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	100 Orang	357,552,000	DBH		100 Orang	356,552,000
1	06	02	2	03	00 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	54 Orang	980,397,000	DBH		54 Orang	985,197,000
1	06	02	2	03	00 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	50 Lembaga	334,895,000	DBH dan SILPA		50 Lembaga	179,895,000

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota								
1	06	04				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang sudah berhasil di rehab	Kab.Bojo negro	75%	7,848,097,552	DBH		75%	4,591,025,352
1	06	04	2	01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang difasilitasi rehabilitasi	Kab.Bojo negro	2.180 Orang	6,623,293,300	DBH		2.840 orang	3,367,604,400
1	06	04	2	01	00 01	Penyediaan Permakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojo negro	300 Orang	218,109,400	DBH		300 orang	219,470,500
1	06	04	2	01	00 02	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojo negro	35 Orang	55,980,000	DBH		20 orang	55,980,000
1	06	04	2	01	00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojo negro	1.540 Orang	6,197,128,400	DBH		1786 orang	2,937,078,400

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	04	2	01	00 06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojonegoro	70 Orang	106,538,000	DBH		70 orang	109,538,000
1	06	04	2	01	00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojonegoro	10 Orang	20,310,000	DBH		10 Orang	20,310,000
1	06	04	2	01	00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojonegoro	240 Orang	25,227,500	DBH		1270 orang	25,227,500
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Presentase/Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan bantuan dan layanan	Kab.Bojonegoro	1.037 Orang	1,224,804,252	DBH		852 orang	1,223,420,952
1	06	04	2	02	00 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojonegoro	180 Orang	15,680,700	DBH		300 orang	15,681,750
1	06	04	2	02	00 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojonegoro	300 Orang	165,593,481	DBH		300 orang	171,343,500

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	04	2	02	00 07	Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	20 Orang	48,284,700	DBH, SILPA dan IF		20 orang	54,284,700
1	06	04	2	02	00 08	Pemberian Bimbingan sosial kepada keluarga penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	15 Orang	35,108,300	DBH		15 orang	35,110,262
1	06	04	2	02	00 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	10 Orang	12,213,900	DBH		10 Orang	12,213,850
1	06	04	2	02	00 12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	30 Orang	154,928,764	DBH		30 orang	153,362,414
1	06	04	2	02	00 13	Pemberian layanan rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	480 Orang	419,942,407	DBH dan SILPA		200 orang	690,385,476
1	06	04	2	02	00 14	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	2 Dokumen	373,052,000	DBH		2 Dokumen	91,039,000
1	06	05				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak terlantar yang berhasil terlindungi dan terjamin (reunifikasi)	Kab.Bojo negoro	100%	115,620,245,316	DBH		100%	50,732,236,512

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
							Presentase Keluarga Masyarakat Fakir Miskin yang dibantu		80%				80%	
1	06	05	2	01		Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang difasilitasi pemeliharaannya	Kab.Bojo negoro	45 Lembaga	13,001,468,000	DBH		45 Lembaga	12,277,168,000
1	06	05	2	01	00 01	Penjangkauan anak- anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	7.869 Orang	12,854,450,000	DBH dan SILPA		8575 orang	12,130,450,000
1	06	05	2	01	00 03	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	3.000 Orang	147,018,000	DBH		3000 orang	146,718,000
1	06	05	2	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase data fakir miskin yang valid	Kab.Bojo negoro	18.276 KPM	102,618,777,316	DBH		8931 KPM	38,455,068,512
1	06	05	2	02	00 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	Kab.Bojon egoro	150 Orang	482,141,961	DBH dan SILPA		200 orang	30,363,200
1	06	05	2	02	00 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	18.276 KPM	84,286,075,123	DBH, DBHCHT dan SILPA		10815 Keluarga	37,783,894,480
1	06	05	2	02	00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	68.193 KPM	875,080,232	DBH		68193 Keluarga	640,810,832
1	06	05	2	02	00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Bojon egoro	13,416 Keluarga	16,975,480,000	SILPA		-	-

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	06				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab.Bojo negoro	100%	2,529,237,014	DBH		100%	1,414,130,232
1	06	06	2	01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase korban bencana yang difasilitasi	Kab.Bojo negoro	30%	1,351,378,100	DBH		30%	1,000,965,600
1	06	06	2	01	00 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	1500 Orang	104,434,600	DBH		1500 orang	80,214,600
1	06	06	2	01	00 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	317 Orang	1,204,238,600	DBH dan SILPA		600 orang	878,046,100
1	06	06	2	01	00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	100 Orang	42,704,900	DBH		200 orang	42,704,900
1	06	06	2	02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kader masyarakat tanggap bencana	Kab.Bojon egoro	200 Orang	1,177,858,914	DBH		200 orang	413,164,632
1	06	06	2	02	00 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	150 Orang	1,177,858,914	DBH dan SILPA		250 orang	413,164,632

NO KODE						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan tahun 2024				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	06	07				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase kebutuhan pemeliharaan dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang terpenuhi	Kab.Bojo negoro	90%	532,040,937	DBH		90%	378,300,132
1	06	07	2	01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Persentase unit sarpras dan pengamanan TMP dan makam leluhur yang dipelihara	Kab.Bojo negoro	13 Unit	532,040,937	DBH		15 unit	378,300,132
1	06	07	2	01	00 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	2 Makam	183,434,605	DBH		13 Makam	33,439,200
1	06	07	2	01	00 03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Kab.Bojon egoro	12 Laporan	348,606,332	DBH		2 Laporan	344,860,932
										134,918,369,342				67.083.074.189

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran P-APBD tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu. Dengan adanya Renja Perubahan tahun 2024, diharapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan senergis serta berkelanjutan dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dalam penyusunan dokumen Renja ini perlu disusun beberapa kaidah-kaidah yang terkait pelaksanaan program/ kegiatan yang meliputi :

- a. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJPD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu pada RKPD memuat kebijakan, program/ kegiatan;
- b. Mempedomani urusan yang telah diatur sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren Pemerintah Daerah.

Bojonegoro, 5 Agustus 2024


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS SOSIAL

Jl. Dr.Wahidin No. 40 Telp. (0353) 881826
BOJONEGORO 62111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/1262.1/412.206/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 — 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;

- KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris dan Kepala Bidang agar menjadikan Rencana Kerja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan pada tahun 2024.
- KETIGA : Segala Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. ARWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650426 198602 1 005

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Ibu Bupati Bojonegoro sebagai laporan.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bojonegoro.
4. Sdr. Yang bersangkutan
-